



Risaukan Dampak Jangka Panjang

Warga Pertanyakan Amdal Hunian-Vertikal

Nanti kalau ada apartemen ini dan pakai PDAM juga, kami kebagian apa.

Tulus Wardaya
Warga

YOGYA, TRIBUN - Warga penolak pembangunan apartemen Dhika Universe di Terban mendatangi Sekretariat Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta, Senin (17/9). Mereka mengadu terkait Amdal dan IMB apartemen yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. "Dulu namanya Taman Melati Sardjito dan mengajukan Amdal dan ditolak. Sekarang ganti nama Dhika Universe dengan data, pemrakarsa, dan orang-orang yang sama kenapa bisa diloloskan," ujar Tulus Wardaya, salah seorang warga penolak. Ia menjelaskan kekhawatiran warga terkait pembangunan apartemen tersebut.

• ke halaman 19

Menyoal Hunian Vertikal



- Tulus Wardaya, seorang warga penolak mempertanyakan terbitnya Amdal apartemen Dhika Universe.
- Ia menyatakan kekhawatiran warga akan dampak ketika apartemen berdiri. Seperti air tanah yang berkurang, dll.
- Pihak pengembang menyatakan sudah mematuhi prosedur perizinan yang disyaratkan Pemkot.
- Kebutuhan air akan menggunakan PDAM dengan saluran yang beda dari milik warga.
- Dinas Lingkungan Hidup menyatakan hanya sekali menerima Amdal dari Apartemen Dhika Universe.
- Ketika Amdal sudah sesuai prosedur, maka IMB pun bisa diterbitkan.

GRAFIS/FAUZIRAKHMAN

Instansi

Nilai Berita

Cifat

Tidak Lupa

Risaukan Dampak

● Sambungan Hal 13

Mulai dari kemungkinan tanah longsor, turbulensi angin, sinar matahari yang terhalang gedung, limbah yang banyak, air tanah terkuras, serta air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dikhawatirkan mengganggu jatah aliran air bersih warga.

"Air PDAM kami itu pukul 09.00 (mengalirnya) sudah setetes dua tetes. Kami nampungnya semalaman dulu. Nanti kalau ada apartemen ini dan pakai PDAM juga, kami sebagian apa," ucapnya.

Tulus menuturkan, terdapat sekitar 150 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembangunan aparte-

men. Awalnya setengah dari warga tersebut menolak. Namun seiring berjalannya waktu, mayoritas warga memilih untuk menerima keberadaan apartemen tersebut.

"Lalu mereka dapat uang yang dinamakan uang kompensasi. Warga yang awalnya menolak dengan alasan sulit air sekalipun akhirnya mau dan bilang urusan air dipikir nanti saja," ujarnya.

Ia yang mengaku rumahnya berjarak sekitar 25 meter dari proyek apartemen menjelaskan, selain masalah lingkungan, kekhawatiran juga muncul terkait masalah sosial. "Apakah mereka (penghuni apartemen) nanti mau ikut kegiatan kami, pengajian, yasinan, arisan, dan mau kenalan sama anak cucu kami," be-

bernya.

Tulus menuturkan bahwa pihaknya telah menyampaikan aduan tersebut ke Forpi sebanyak dua kali. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebanyak satu kali, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta beberapa kali.

Kumpulkan informasi

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba menjelaskan, pihaknya akan mengumpulkan informasi dan data di lapangan, termasuk akan mengundang pihak pengembang atau pemrakarsa.

"Peninjauan ke lokasi akan segera kami lakukan," imbuhnya.

Kamba menuturkan, jika

dari hasil pengumpulan informasi dan data nantinya ada hal-hal yang melanggar pakta integritas, yakni proses keluarnya Amdal, maka Forpi meminta Wali Kota Yogyakarta untuk menghentikan sementara proses pembangunan hingga prosedur dilakukan secara baik.

"Sebagai rekomendasi ke depan perlu adanya pengawasan yang ketat dari instansi berwenang atas proses pembangunan yang ada di wilayah," jelasnya.

Selain itu, lanjut Kamba, pihak pengembang harus melakukan proses sosialisasi ke warga secara baik serta tuntas. "Ini agar tidak ada persoalan lagi di warga dan menghindari terjadinya konflik horizontal," tuturnya. (kur)

Pengembang: Kami Patuh Prosedur

PROJECT Director Apartemen Dhika Universe, Damar-yanda Pawitan menjelaskan, pihaknya mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk mendirikan bangunan apartemen yang ditanganinya, baik dokumen Amdal maupun IMB.

"Kalau ada penolakan dari warga itu wajar. Tapi kami telah mematuhi prosedural dan yang memberi izin pemerintah. Amdal dan IMB keluar kenapa saya yang disering. Kita tidak melakukan pelanggaran apa-apa," tuturnya, Senin (17/9).

Sebelum IMB keluar, pihaknya juga telah datang menemui warga untuk 'kulonwun' akan melakukan pembangunan proyek di sekitar tempat tinggal mereka.

● ke halaman 19

Pengembang: Kami

● Sambungan Hal 13

"Kami juga melakukan konsultasi dengan warga yang berimpitan.

Nantinya akan dibangun 10 lantai ke atas dan 2 lantai ke bawah. Ketinggiannya sesuai dengan peraturan, 32 meter," jelasnya.

Damar menambahkan, adanya uang kompensasi merupakan hal yang sah dan wajar diberikan kepada warga. Bentuknya pun tidak harus uang, bisa juga berbentuk pembangunan fasilitas, misalkan balai rukun warga (RW). "Tergantung kesepakatan warga," ucapnya.

Damar juga menegaskan,

pihaknya tidak akan menggunakan air tanah dan akan menggunakan PDAM. Saluran yang digunakan untuk PDAM apartemen berbeda dengan milik warga. "Kami sudah MoU (*memorandum of understanding*) dengan PDAM tentang itu," ujarnya.

Konfirmasi pemkot

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Suyana menjelaskan, pihaknya belum pernah menolak Amdal pertama Apartemen Dhika Universe yang dulunya bernama Taman Melati Sardjito tersebut. "Dulu belum pernah mengajukan, baru sekali ini. Taman Melati Sardjito, belum pernah mengajukan Amdal," bebemnya.

Suyana menjelaskan,

pada proses Amdal tersebut, pemrakarsa menyampaikan rencana kegiatan beserta kemungkinan dampak yang akan terjadi serta cara menanggulunginya.

"Lalu warga menyampaikan ada kekhawatiran apa, misal air tanah. Kalau ketakutan tentang air tanah, maka pemrakarsa menggunakan PDAM. Kalau kajian lingkungan isinya seperti itu. Jadi setiap perkiraan dampak yang akan muncul, ada cara mengatasi dampak. Kecuali kalau dampak yang muncul tidak bisa ditanggulangi, kemungkinan ditolak," urainya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyana menuturkan,

selama persyaratan sudah dipenuhi dan benar, maka pihaknya akan mengeluarkan IMB. "Salah satu syarat dikeluarkannya IMB adalah dengan adanya Amdal," tuturnya.

Terkait penolakan warga terkait pembangunan apartemen, ia mengatakan bahwa aspirasi tersebut harusnya disampaikan saat Amdal. Ketika Amdal sudah keluar maka tidak ada halangan bagi pihaknya untuk mengeluarkan IMB.

"Kalau untuk IMB, yang wajib mengetahui adalah persil yang berimpitan langsung dengan proyek. Jadi ada berapa persil yang berimpitan langsung secara keliling, itu yang harus mengetahui," urainya. (kur)

1. Forpi 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
---	--------	--------	-----------------

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005